



Romi Wijaya Apresiasi BPK Kalbar

Pemeriksaan Interim LKPD Kayong Utara



SUKADANA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Rabu (13/3). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi atas hasil pemeriksaan yang telah berlangsung selama 25 hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Pertemuan ini dipimpin oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan Interim LKPD Kayong Utara Tahun 2025, Adi Satrianingtyas, dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemeriksa Aditya Harigama beserta tiga anggota Tim Pemeriksa BPK Kalbar. Sementara dari pihak

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, hadir Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, S.Sos., M.Si., didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Kayong Utara, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Dalam pemaparannya, Adi Satrianingtyas menyampaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam pemeriksaan ini mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemer-

iksa BPK Kalimantan Barat atas kerja keras dan profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kayong Utara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkoordinasi dan berkontribusi dalam mendukung proses pemeriksaan ini. Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa Exit Meeting ini bukan sekadar akhir dari pemeriksaan, tetapi juga menjadi awal dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Romi Wijaya juga menekankan pentingnya konsistensi dan koordinasi dalam pengelolaan anggaran di setiap OPD.

Setiap tahapan administrasi keuangan harus berjalan sesuai regulasi agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan APBD. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga akan terus memperkuat pengawasan internal guna mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan daerah, pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap OPD dapat menjalankan proses anggaran secara akurat dan sesuai aturan. Optimalisasi sektor pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi secara transparan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. **(dan)**